



Judul : Calon Kapolri: DPR Ngotot Libatkan KPK dan PPATK
Tanggal : Selasa, 13 Januari 2015
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

► CALON KAPOLRI

DPR Ngotot Libatkan KPK dan PPATK

JAKARTA—DPR akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menguji Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.

Ashari Purwo & Dika Irawan
redaksi@bisnis.co.id

Padahal Presiden Joko Widodo mengabaikan dua lembaga antirasuah itu. Asrul Sani, anggota Komisi III sekaligus anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang merumuskan *fit and proper test* (tes kepatutan dan kepantasannya) calon Kapolri, mengatakan DPR malah akan meminta pendapat dua institusi itu. Budi Gunawan selama ini diterpa isu memiliki rekening gendut.

"Kami akan minta data KPK dan

PPATK tentang Budi Gunawan," katanya seusai rapat Komisi III DPR, Senin (12/1).

Data tersebut akan disandingkan dengan keterangan yang diambil dari pernyataan Budi saat *fit and proper test*. "Fungsi data itu hanya klarifikasi. DPR tidak menginginkan ada pejabat pilihan Presiden Jokowi bermasalah saat menjalankan tugasnya," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu Romahurmuziy itu.

Meski demikian, Asrul menolak anggapan DPR mementahkan penyelidikan internal Polri yang menyata-

kan Budi bersih dari kepemilikan rekening gendut.

"Bambang Hendarso Danuri, Kapolri yang menjabat saat itu, pernah menyatakan Budi bersih. Tapi penyelidikan anggota Polri tidak seharusnya dilakukan oleh institusi Polri sendiri. Jadi DPR perlu mengklarifikasi," katanya.

Data dari KPK dan PPATK itu, lanjut Asrul, juga untuk mengklarifikasi kicauan mantan Kepala PPATK Yunus Husein di akun Twitter @YunusHusein.

"Dalam akun Twitternya, Yunus menulis bahwa Budi pernah dicalonkan masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi namun gagal atau tidak lulus karena rapornya merah," katanya.

Dalam kicauan itu, Yunus meminta Jokowi untuk tidak tunduk kepada tekanan politik pribadi maupun golongan karena bisa berdampak pada melemahnya kepercayaan publik. Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J. Mahesa, menilai penunjukan calon tunggal Kapolri ini mem-



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

buktikan ada ketidakberesan yang dilakukan Jokowi terkait pencalonan Budi yang pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Desmond juga menyayangkan tidak adanya sikap proaktif dari KPK dan PPATK untuk meneliti rekam jejak Budi. "Seharusnya dua instansi itu lebih proaktif. Kenapa saat pemilihan menteri dilibatkan, kenapa Kapolri tidak?" kata Desmond yang juga Ketua DPP Partai Gerindra.

Ketua DPR Setya Novanto meminta Budi Gunawan menjelaskan soal tuduhan kepemilikan rekening gendut. Soal kasus itu, Setya menyerahkan sepenuhnya ke Komisi III DPR.

Politikus PKS Nasir Zamil juga akan menginisiasi mengundang PPATK dan KPK terkait dengan pencairan BG.

"Perihal rekening gendut kita tidak usah menduga-duga karena bisa saja itu harta yang sah dan saya berharap PPATK bisa menjelaskan," ujar Nasir.

Terpisah, pakar kepolisian dari

Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, mengatakan calon Kapolri harus mampu memiliki *frame* polisi ke depan yaitu polisi sipil, tidak sebatas alat negara.

Menurut dia, polisi sipil itu memiliki orientasi pada pelayanan masyarakat dengan menjaga keteribatan dan keamanan umum.

"Alat negara hanya untuk mempertahankan kekuasaan elite," katanya kepada Bisnis di Jakarta, Senin.

Dia menilai hal tersebut harus diutamakan Polri sebagai budaya organisasi. Tugas pokok dan fungsi polisi seperti menjaga keamanan, memberikan pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum tersebut harus dipahami secara konstruktif oleh polisi.

Sementara itu, dia melihat saat ini budaya organisasi di tubuh Polri tidak terbangun. Masing-masing korps bekerja sendiri-sendiri. "Brimob bekerja sendiri, intel bekerja sendiri," katanya.

Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berharap Ka-

► DPR akan meminta masukan KPK dan PPATK soal rekening gendut Budi Gunawan.

► DPR hanya bisa menerima atau mengembalikan nama calon Kapolri ke Presiden.

polri mendatang membentuk densus antikorupsi.

Menurut komisioner Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan, Polri harus bekerja maksimal dalam menangani kasus korupsi. Edi memberikan contoh seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membentuk 'Satgasus' untuk menangani perkara korupsi yang mangkrak di Kejagung.

Menurut Edi, jika Polri membentuk densus antikorupsi, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) di bawah Kabareskrim tidak diperlukan lagi. (*Sholahuddin Al Ayyubi*) ■